

LAPORAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(P3M) IKIP PADANG



Oleh :

SEKELAH UPJ PERPUSTAKAAN

IKIP PADANG

Drs. Sukardi

(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini diblayai oleh
Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang
Tahun Anggaran 1992/1993
Surat Perjanjian Kerja No : 222/PT37.H9/N.2.2/1992
Tanggal 1 Juli 1992

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1993

LAPORAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(P3M) IKIP PADANG

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TEL	24-3-94
SUMBER HARTA	HD
KOLEKSI	KKI
NOI VE TARIK	120/HD/94-P.L.I
CALL NO	378 DUK PD



Personalia Peneliti

Konsultan : Drs. Nazulis. Z
Ketua : Drs. Sukardi
Anggota : Drs. Syafnil Effendi, SH
Drs. Alizamar
Drs. Zulkahar Adenan
Drs. Anasrul

PENGANTAR

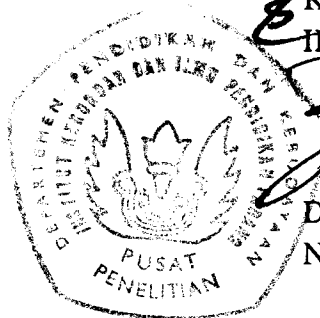
Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Januari 1993

Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang,



[Handwritten Signature]
Dr. Zainil, M.A.
NIP 130187088

ABSTRAK

Pada hakekatnya pemerintah melalui "Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kerangka Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang 1978" telah menetapkan suatu "Pola Pembinaan dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi" yang terprogram, terarah dan terpadu. Dari kedua pedoman di atas dapat diketahui bahwa pola pembinaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang terprogram, terarah dan terpadu juga ikut dirumuskan.

Dari segi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat IKIP Padang melalui Pusat Pengabdian Pada Masyarakat telah berhasil melaksanakan sejumlah program dengan melibatkan ratusan dosen semenjak tahun 1983. Dalam 10 tahun yang akan datang direncanakan peningkatan kuantitas dan kualitas program kegiatan. Mengingat tantangan yang semakin kompleks dalam memasuki era pembangunan jangka panjang tahap kedua ini, maka peranan dan kepekaan perguruan tinggi lebih dituntut untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan antara lain dengan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) secara selektif dan tepat guna. Peningkatan jumlah dan kualitas program yang dimaksud tentu harus pula diikuti dengan pengembangan organisasi pengelolanya, dengan pengertian struktur, personalia, manajemennya dan potensi kelembagaan lainnya perlu disesuaikan. Oleh sebab itulah penelitian tentang Pengembangan Pusat Pengabdian Pada Masyarakat ini diajukan kepada IKIP Padang melalui Pusat

Penelitian tahun anggaran 1992/1993. Dengan harapan bahwa pengembangan yang dimaksud mengacu kepada merealisasikan Statuta IKIP Padang pasal 28 ayat 1 yakni: "Pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, yang bertugas: 1) menjabarkan kebijaksanaan institut dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, 2) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat antar fakultas, 3) melaksanakan kontak kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak luar Institut yang bersifat antar fakultas, dan 4) memantau dan mengevaluasi usul dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat". Ayat 2 dan 4 menyebutkan bahwa: "Kebijaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk ikut berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang kependidikan, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dilengkapi dengan staf ahli Koordinator Program dan tenaga administrasi".

PENGANTAR

Penelitian ini merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Februari 1993
Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang,

Dr. Zainil, M.A
NIP. 130187088

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR IST	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pengertian dan Azas Darma Pengabdian Kepada Masyarakat	6
C. Tujuan, Fungsi, Sifat, dan Status	11
BAB II. MISI DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYA- RAKAT	15
A. Misi	15
B. Pelaksanaan dan Hasil.....	16
C. Permasalahan	22
BAB III. TUJUAN PENGEMBANGAN P3M IKIP PADANG.....	23
A. Tujuan Program Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk 10 Tahun Menda- tang	23
B. Tujuan Khusus Pengembangan Yang Akan Di- capai	24
BAB IV. STRATEGI PENGEMBANGAN	29
A. Harapan Nasional	31
B. Harapan Daerah	32
C. Harapan Bidang Pendidikan	32

BAB V. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN	38
A. Program Pengembangan	38
B. Kegiatan	43
BAB VI. ORGANISASI DAN SUMBER DANA	47
A. Organisasi	47
B. Pengelola.....	48
C. Tugas dan Fungsi.....	49
D. Sumber Dana	50
DAFTAR KEPUSTAKAAN	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang Oleh Staf Pengajar Tahun 1983-1992	17
Tabel 2 Jumlah Staf Pengajar IKIP Padang Tahun 1990-1992	18
Tabel 3 Prosentase Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang Oleh Staf Pengajar Tahun 1990-1992	18
Tabel 4 Keadaan Personalia Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IKIP Padang	30
Tabel 5 Beberapa Rumusan Tentang Starategi Pengembangan Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat Khas IKIP Padang	35
Tabel 6 Beberapa Aspek Tentang Program Starategi Pengembangan Kelmbagaan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang	36
Tabel 7 Perioritas Program Operasional Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Mendatang.....	42
Tabel 8-14 Proyeksi Keadaan dan Pertambahan Staf Pengajar Masing-masing Fakultas menurut jurusan di IKIP Padang	52

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Struktur Organisasi Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang	27
Bagan 2 Struktur Organisasi Kelembagaan Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IKIP Padang	29
Bagan 3 Struktur Organisasi Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang	48

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan nasional Jenderal Suharto semenjak pelaksanaan Pelita I tahun 1969 sampai pada tahun kedua Pelita V ini telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia kepada suatu kondisi yang memungkinkan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan diri. Kondisi yang demikian merupakan peluang sangat kondusif untuk segera dapat mewujudkan cita-cita Pembangunan Nasional Indonesia. Hasil pembangunan yang telah dicapai itu dan yang akan diwujudkan pada Pelita-Pelita berikutnya selalu mempedomani GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) sebagai produk rakyat melalui wakil-wakil di MPR RI. Dari GBHN itu dan implementasinya dalam tahap-tahap pembangunan melibatkan rakyat sebagai modal dasar dan pelaku pembangunan.

Tujuan pembangunan nasional tersebut akan dapat dicapai secara bertahap yakni melalui Pelita demi Pelita. Setiap Pelita mempedomani GBHN yang disusun oleh rakyat melalui wakil-wakilnya didalam sidang MPR pada setiap penghujung pelaksanaan Pelita sebelumnya. Semua perubahan disektor-sektor kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dipandu oleh GBHN tersebut; dan seluruh rangkaian perubahan dan prosesnya itu dicapai berlandaskan kepada beberapa azas, diantaranya Azas Manfaat dan Azas Usaha Bersama. Dengan berdasarkan azas-azas yang dimaksud maka akan diwujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin

meningkat dan pribadi warga negara yang mampu mengembangkan dirinya sendiri. Untuk pencapaian perubahan yang demikian harus diusahakan oleh seluruh rakyat secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Masyarakat Perguruan Tinggi sebagai bagian integral rakyat telah dan senantiasa dituntut perannya dalam proses pencapaian tujuan pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Perguruan Tinggi dalam memenuhi tuntutan pembangunan tersebut mewujudkannya melalui perannya yang disebut Darma Perguruan Tinggi, diantaranya darma pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi bukanlah menara gading di masyarakat. Melalui pengabdian kepada masyarakat itu, perguruan tinggi ingin membuktikan bahwa institusi tersebut adalah bagian integral masyarakat yang secara moral bertanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya sesuai pengetahuan, ilmu dan teknologi serta seni (IPTEKS) yang dimiliki. Ibarat ikan dengan air, hubungan timbal balik yang ada akan saling menguntungkan. Disatu pihak akan tumbuh menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan dipihak lain berkembang menjadi masyarakat yang mampu mengikuti dan menyerap pembaharuan dan perubahan/pembangunan bangsa yang berkesinambungan menuju perwujudan cita-cita luhur bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui darma pengabdian kepada masyarakat dan dua darma yang lainnya (pendidikan dan penelitian) perguruan tinggi akan dapat menjaring umpan balik dari masyarakat menuju peningkatan makna keberadaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Masyarakat yang bervariasi dalam profesi dengan segala latar belakang harus didekati, dilibatkan, diangkat derajatnya sehingga menjadi masyarakat berkualitas sesuai kemampuan dan bidang kehidupan (profesi) mereka.

Berbagai bentuk kegiatan dapat diprogramkan oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat. Memberikan pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan hasil penelitian, pengembangan wilayah secara terpadu, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan kaji tindak merupakan cakupan bentuk kegiatan (DINLITABMAS 1992:9). Dari bentuk kegiatan itu dapat dijabarkan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat dan perguruan tinggi itu sendiri.

Pada hakekatnya pemerintah melalui "Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kerangka Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang 1978" telah menetapkan suatu "Pola Pembinaan dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi" yang terprogram, terarah dan terpadu (P3M 1990 : 2). Dari kedua pedoman di atas dapat diketahui bahwa pola pembinaan dan pengembangan

pengabdian kepada masyarakat yang terprogram, terarah dan terpadu juga ikut dirumuskan.

Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi dilaksanakan melalui kelembagaan pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan IKIP Padang sebagai satu lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam menghasilkan tenaga kependidikan melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat dibawah koordinasi suatu kelembagaan khusus untuk dharma tersebut. Dalam hal ini Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IKIP Padang. Sampai saat ini hingga waktunya diberlakukan PP No. 30 Tahun 1990 sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaannya tetap mempertahankan eksistensi kelembagaan tersebut. Kehadiran lembaga itu sesuai dengan PP No. 5 Tahun 1980. Kepres No. 40 Tahun 1982 dan SK Mendikbud No. 0126/0/1983.

Dari segi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat IKIP Padang melalui Pusat Pengabdian Pada Masyarakat telah berhasil melaksanakan sejumlah program dengan melibatkan ratusan dosen semenjak tahun 1983. Untuk tahun anggaran 1990/1991 ini saja telah dilaksanakan 75 program kegiatan yang mengikutsertakan 450 orang dosen. Dalam 10 tahun yang akan datang direncanakan peningkatan kuantitas dan kualitas program kegiatan. Mengingat tantangan yang semakin kompleks dalam memasuki era pembangunan jangka panjang tahap kedua ini, maka peranan dan kepekaan perguruan tinggi lebih dituntut untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan antara

lain dengan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) secara selektif dan tepat guna. Peningkatan jumlah dan kualitas program yang dimaksud tentu harus pula diikuti dengan pengembangan organisasi pengelolanya, dengan pengertian struktur, personalia, managemennya dan potensi kelembagaan lainnya perlu disesuaikan. Oleh sebab itulah penelitian tentang Pengembangan Pusat Pengabdian Pada Masyarakat ini diajukan kepada IKIP Padang melalui Pusat Penelitian tahun anggaran 1992/1993. Dengan harapan bahwa pengembangan yang dimaksud mengacu kepada merealisasikan Statuta IKIP Padang pasal 28 ayat 1 yakni: "Pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, yang bertugas: 1) menjabarkan kebijaksanaan institut dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, 2) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat antar fakultas, 3) melaksanakan kontak kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak luar Institut yang bersifat antar fakultas, dan 4) memantau dan mengevaluasi usul dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat". Ayat 2 dan 4 menyebutkan bahwa: "Kebijaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk ikut berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang kependidikan, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dilengkapi dengan staf ahli Koordinator Program dan tenaga administrasi".

B. Pengertian dan Azas Dharma Pengabdian Pada Masyarakat

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dirasa perlu adanya kesamaan pengertian mengenai hakekat pengabdian pada masyarakat. Dari kesatuan bahasa tentang hakekat pengertian dan azas pengabdian pada masyarakat itu diharapkan timbul kesatuan pandangan, sikap dan pelaksanaannya.

1. Pengertian

Pengertian pengabdian kepada masyarakat seperti yang tertulis dalam Buku Kebijakan Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi (BINLITABMAS) dirumuskan sebagai berikut: "Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung pada masyarakat secara melembaga melalui metodologi ilmiah sebagai tanggung jawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional".

Dari rumusan pengabdian kepada masyarakat di atas, dapat dipahami makna, fungsi, pelaksanaan fungsi, aspek idiil/filosofis dan yuridis formal, yakni:

- a. Pengabdian kepada masyarakat berfungsi dan bertujuan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kepentingan kemanusiaan dan pengembangan kemampuan masyarakat sehingga dapat

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

- mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- b. Pengabdian kepada masyarakat itu dilaksanakan secara melembaga, artinya bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam makna program atau kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tersebut dilakukan oleh atau atas nama perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sivitas akademika yang sebelumnya diketahui dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi.
- c. Sebagai landasan idiil atau filosofis dalam pengabdian kepada masyarakat adalah nilai-nilai luhur budaya kita dan etika ilmu pengetahuan khususnya. Dalam hal ini falsafah bangsa Pancasila merupakan sumber nilai-nilai luhur budaya itu. Landasan idiil atau filosofis itu secara tegas tertuang dalam Undang-Undang No.22 tahun 1961, Bahwa perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Pancasila.
- d. Secara yuridis formal bahwa pengembangan diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: kegiatan yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai landasan hukum yuridis formalnya adalah Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 22 ayat 1.

e. Pengabdian kepada masyarakat itu dilaksanakan melalui metodologi ilmiah, artinya bahwa program atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu memerlukan suatu metoda yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasinya. Dengan menggunakan metodologi ilmiah ini akan dapat menjaring umpan balik yang bermakna ganda. Data tentang potensi, kemampuan, masalah, dan hambatan pembangunan yang dijaring dari masyarakat merupakan masukan yang berguna bagi perguruan tinggi dalam mengemban fungsi pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

2. Azas-Azas Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Azas Kelembagaan

Berarti bahwa setiap kegiatan dilakukan oleh dan atau atas nama lembaga perguruan tinggi. Mengenai teknis pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh perorangan atau sekelompok sivitas akademika untuk atau atas nama lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, normatif, organisatoris dan administratif oleh unsur-unsur pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

b. Azas Ilmu Amaliah dan Amal Ilmiah

Perguruan Tinggi seharusnya dengan landasan

idil/filosofis Pancasila mempunyai niat yang ikhlas untuk mengamalkan/mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya untuk kepentingan peningkatan kualitas masyarakat menuju tercapainya cita-cita Pembangunan Nasional.

Begitu pula dengan landasan etika ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat hendaknya menggunakan metoda ilmiah baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Dengan demikian penerapan, pengembangan, dan penyebar luasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada masyarakat dapat diusahakan manfaatnya serta dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, ekonomis, sosial, etis dan politis secara baik.

c. Azas Inisiatif, Responsif, Kreatif dan Inovatif

Inisiatif artinya bahwa pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada prakarsa civitas akademika. Responsif berarti bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai tanggapan terhadap permintaan masyarakat.

Kreatif dan Inovatif berarti mencerminkan perubahan-perubahan pembaharuan dan peningkatan di dalam segi-segi sikap, cara, waktu, kualitas dan kuantitas.

d. Azas kerjasama

Azas kerjasama berarti bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha

bersama antara perguruan tinggi dan masyarakat yang dibantu dan dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong, dengan mengindahkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

e. Azas Kestinambungan

Azas kestinambungan berarti bahwa program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap dan berkestinambungan sampai diperoleh hasil-hasil yang nyata. Dengan demikian diperlukan perencanaan, sistematika, keterpaduan, keterarahan dan kestinambungan.

f. Azas Daya guna dan Tepat guna

Penggunaan sumber daya harus mencapai hasil seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian azas daya guna dan tepat guna sudah diperhatikan.

g. Azas Edukatif dan Pembangunan

Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat edukatif dan pengembangan masyarakat dalam menunjang pembangunan. Hal ini bermakna bahwa dengan azas edukatif dan pengembangan, program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mengembangkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia kearah terciptanya manusia pelaku pembangunan, serta pengembangan

masyarakat kearah terbinanya masyarakat belajar dalam rangka pendidikan seumur hidup.

C. Tujuan, Fungsi, Sifat dan Status

1. Tujuan

Tujuan institusional pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sumber daya manusia ke arah terciptanya manusia pelaku pembangunan. Manusia pelaku pembangunan adalah manusia yang selalu meningkatkan kesiapan mental dan kesadarannya menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan dinamika pembangunan sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, serta mapan dan mampu menjawab tantangan pembangunan dengan lebih baik.
- b. Mengembangkan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat belajar. Masyarakat belajar adalah masyarakat yang sadar akan perlunya belajar secara berkelanjutan, selalu berkeinginan memiliki pengetahuan baru dan tampil sebagai pelopor untuk mengadakan pembaharuan.
- c. Meningkatkan kepekaan sosial para tenaga akademik dan mahasiswa terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi. Misalnya menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun melalui

umpan balik yang terjaring dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Fungsi

Fungsi Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Padang adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pengabdian kepada masyarakat.
- b. Merintis, melaksanakan, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan Instansi di luar IKIP Padang dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengurus, membina, mengembangkan program-program yang bersifat pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mengurus, membina, mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat yang bersifat darurat dan mendadak seperti adanya bencana alam dan lain-lain.
- f. Mengusahakan dana dari sumber-sumber lain selain dari dana IKIP Padang atau pun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Membina, mengurus, mengembangkan program-program pendidikan sambung-menyambung bagi masyarakat luas seperti pendidikan non-formal.
- h. Menyelenggarakan, merangsang dan mengusahakan pertemuan-pertemuan antar disiplin ilmu untuk menelaah masalah-masalah yang akan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

dilaksanakan/digarap.

- i. Menyelenggarakan/memberi penerangan-penerangan kepada masyarakat maupun kepada lingkungan sendiri tentang program-program pengabdian kepada masyarakat yang ada.
- j. Mengkoordinasikan program-program pengabdian kepada masyarakat yang perlu dilakukan antar perguruan tinggi.

3. Status

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980 Pasal 38, status kelembagaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Padang adalah setingkat Pusat dengan nama Pusat Pengabdian Pada Masyarakat. Namun setelah disetujinya Statuta IKIP Padang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 18 November 1992 maka kelembagaan ini berubah statusnya menjadi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yakni:

1. Pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, yang bertugas:
 - a. Menjabarkan kebijaksanaan institut dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat antar fakultas;
 - c. Melaksanakan kontrak kerjasama pengabdian kepada

- masyarakat dengan pihak luar institut yang bersifat antar fakultas;
- d. Mengkoordinasi peningkatan kemampuan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Memantau dan mengevaluasi usul dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kebijakanaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian untuk ikut berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang kependidikan.
 3. Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah Ketua dan Sekretaris.
 4. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dilengkapi dengan staf ahli koordinator program dan tenaga administrasi.
 5. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor untuk masa jabatan tiga tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali berturut-turut.
 6. Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
 7. Persyaratan, pemilihan dan pengangkatan untuk jabatan Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diatur dengan keputusan Rektor.

BAB II

MISI DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Misi

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu darma perguruan tinggi menjadi tanggung jawab sivitas akademika untuk dapat dilaksanakan secara serasi dengan darma pendidikan dan penelitian.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, hasil penelitian dan pendidikan dapat secara langsung diamalkan penggunaannya pada masyarakat. Sebaliknya hasil pengalaman dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan serta memajukan mutu pendidikan, dan masalah-masalah yang ditemukan di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Dengan demikian ilmu pengetahuan tidak hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu saja, akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan pembangunan yang semakin meningkat maka dituntut pula peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sekaligus berkondisi serasi dengan darma lainnya dan lebih dilaksanakan lebih efisien serta dalam pelaksanaannya. Dengan demikian dapat dikatakan misi darma pengabdian kepada masyarakat, yakni:

1. Kegiatan yang merupakan penjabaran misi pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan.

2. Kegiatan ini memiliki kriteria dan nilai-nilai yang berpijak pada landasan dan pengertian yang sama dan asas-asas yang lebih serasi dengan identitas perguruan tinggi.
3. Kegiatan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai masalah pembangunan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

B. Pelaksanaan dan Hasilnya

Sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi mempedomani (1) Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 1980 (sebelum tahun 1990), (2) Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1990 (semenjak tahun 1990) yang tertuang dalam BAB VIII tentang "Susunan Perguruan Tinggi, bagian kedua, Universitas dan Institut, Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh perguruan tinggi melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan. Sedangkan, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang bersifat koordinatif di lingkungan perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan" (PP No. 30 tahun 1990 Pasal 43 ayat (2). Selanjutnya dijelaskan bahwa Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi (PP No. 30 tahun 1990 Pasal 43 ayat (4). Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan universitas/institut yang bersangkutan (PP No. 30 tahun 1990 Pasal 3 ayat (5)).

Realisasi dari peraturan tersebut di atas Pusat Pengabdian pada Masyarakat IKIP Padang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya seperti pada tabel 1 di bawah ini (Dokumentasi P3M IKIP Padang tahun 1992).

Tabel 1

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Padang
Oleh Staf Pengajar Tahun 1983-1992

FAK.	T A H U N										JML.
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	
FPBS	2	10	10	12	12	11	12	10	42	20	141
FIP	20	7	28	17	17	21	30	25	72	24	261
FPIPS	20	18	17	14	14	12	14	18	66	43	236
FPMIPA	47	101	75	13	13	2	9	8	72	28	368
FPTK	12	60	60	14	14	8	18	19	138	50	393
FPOK	42	26	26	28	28	28	28	36	54	19	315
JUMLAH	143	222	216	98	98	82	111	116	444	184	1714

Selanjutnya dikemukakan bahwa keadaan jumlah staf pengajar IKIP Padang sampai tahun 1992 adalah seperti yang tertera dalam tabel 2 di bawah ini:

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Tabel 2

Jumlah Staf Pengajar IKIP Padang Tahun 1990-1992

FAKULTAS	T A H U N			JUMLAH
	1990	1991	1992	
FPBS	139	165	173	477
FIP	169	205	228	602
FPIPS	154	163	170	487
FPMIPA	135	138	139	412
FPTK	171	173	174	518
FPOK	93	93	95	281
JUMLAH	861	937	979	2.777

Dengan membandingkan antara tabel 1 diatas terhadap tabel 2, maka didapat prosentase seperti tabel 3 berikut:

Tabel 3

Prosentase Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang Oleh Staf Pengajar Tahun 1990-1992

FAKULTAS	T A H U N			JUMLAH RATA-RATA (%)
	1990 (%)	1991 (%)	1992 (%)	
FPBS	7	25	11,5	14,5
FIP	15	35	10,5	20,2
FPIPS	12	40	24	22
FPMIPA	5	52	20,1	25,7
FPTK	11	79	12,8	34,26
FPOK	38	58	20	38,6
JUMLAH r(%)	14,2	48,2	16,5	26,3

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah prosentase rata-rata staf pengajar IKIP Padang pada tahun 1992 (sebanyak 979 orang) hanya 16,5 % yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa dengan keadaan pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan jumlah dana yang tersedia setingkat Pusat Pengabdian pada Masyarakat adalah relatif kecil. Oleh sebab itu diasumsikan mereka mempedomani Pasal 28 Statuta IKIP Padang yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 November 1992 tentang statua kelembagaan setingkat dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, diharapkan kegiatan staf pengajar IKIP Padang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (tridarma ketiga) akan meningkat.

Selanjutnya perlu juga dikemukakan bahwa di samping kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh staf pengajar juga ada yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang sampai saat ini Pusat Pengabdian pada Masyarakat IKIP Padang sudah menerjunkan sebanyak 12.780 orang mahasiswa ke desa-desa dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat dari tahun 1975 -1992 (data Pusngabmas IKIP Padang 1992). Dengan demikian bahwa kegiatan Pusat Pengabdian pada Masyarakat selama ini cukup padat. Oleh sebab itu dengan mengembangkan kelembagaan dari berbentuk satu pusat menjadi lembaga akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kegiatannya.

WALIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Seperti yang telah dijelaskan dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat (1991:ii) bahwa idealisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terletak pada perencanaan dan berkesinambungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra positif bagi IKIP Padang.

Darma ini telah diselenggarakan dan berkembang sejalan dengan tahapan pembangunan bangsa Indonesia. Adapun manfaatnya telah dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat secara perorangan ataupun organisasi. Manfaat itu dalam bentuk sumbangan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan nasional.

Bersamaan dengan upaya meningkatkan peran serta IKIP Padang dalam pembangunan nasional maupun daerah melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat timbul pula kecendrungan tumbuhnya pemikiran-pemikiran yang semakin mengaburkan eksistensi, arah, dan orientasi, serta fungsi pengabdian kepada masyarakat yang pada hakeketnya disebabkan belum dimilikinya persepsi yang benar dan tepat mengenai darma pengabdian kepada masyarakat di samping kurangnya persepsi staf pengajar tentang darma ini. Untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul dipandang perlu meningkatkan kegiatan dan pengabdian kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Setiap upaya peningkatan nilai tambah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu mendapat dukungan

semua pihak, khususnya unsur-unsur pimpinan di IKIP Padang dan staf pengajarnya. Agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan staf pengajar untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka menyebar luaskan ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun ke tahun selalu berbentuk program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama masyarakat yang relatif belum berkembang.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk membantu warga masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan sendiri berbagai persoalan yang dihadapinya.

Mewngingat IKIP Padang adalah lembaga ilmiah, maka sesuai dengan azas ilmu amaliah dan amal ilmiah maka program dikembangkan dengan menggunakan pendekatan atau metode ilmiah yang didasarkan atas ilmu yang dimiliki.

Di samping itu juga dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan kelembagaan yaitu berupa:

1. Peningkatan mutu sataf ahli dan staf administrasi dalam hal pengetahuan , keterampilan dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengadaan alat-alat penunjang pengabdian pada masyarakat.
3. Peningkatan mutu dan kwanntitas program-program

pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:

- a. Peningkatan pendidikan pada masyarakat.
- b. Peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Pemantapan pelaksanaan kaji tindak
- d. Pemantapan penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa program S1 IKIP Padang.
- e. Pengembangan wilayah terpadu.
- f. Perintisan, pelaksanaan programn desa binaan

C. Permasalahan

Permasalahan Pusat Pengabdian pada Masyarakat IKIP Padang adalah tentang ketenagaandan pendanaan, yakni:

1. Tenaga pengelola administrasi di lingkungan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Padang dirasakan kurang memadai dari segi jumlah dan kualifikasi yang ada sekarang.
2. Tenaga edukatif yang mendukung kelompok akademikpun dirasakan belum mendukung sepenuhnya keberhasilan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memperoleh tenaga akademis yang mempunyai jiwa penuh pengabdian atau memiliki dedikasi yang tinggi merupakan kendala yang sering muncul kalau kendala kekurangan dana pengelolaan lembaga pengabdian kepada masyarakat tidak segera diatasi.
3. Dana yang tersedia untuk setiap tahun anggaran dalam jumlah yang terbatas membatasi pila upaya-upaya pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pengajar sehingga berdampak luas terhadap peningkatan kualitas dan kwantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN PENGEMBANGAN P3M IKIP PADANG

A. Tujuan Program Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk 10 Tahun Mendatang.

Tujuan yang akan dicapai melalui program pengembangan pengabdian kepada masyarakat dalam 10 tahun mendatang dibagi menjadi 2 tahap yaitu Tahap Lima Tahun Paruhan I dan Tahap Lima Paruhan II.

Pada akhir tahun ke lima pelaksanaan program pengembangan Tahap Lima Tahun Paruhan I diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengabdian kepada masyarakat yang dialami selama lima tahun sebelum dan dan dewasa ini. Permasalahan itu menyangkut peranan perguruan tinggi melalui dharma pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup sistem pengelolaan, kesadaran dosen dan mahasiswa dalam memiliki jiwa, dan tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Hasil yang diharapkan itu dibedakan menjadi tujuan umum program pengembangan dan tujuan khusus program pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang hendak dicapai.

1. Tujuan Umum Program Pengembangan

Tujuan umum program pengembangan yang akan dicapai hendaknya dapat merealisasikan:

- a. IKIP Padang sebagai pusat pengembangan, pemeliharaan, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kepekaan tenaga pengajar dan mahasiswa terhadap masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.
- c. Suatu sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih aktif dan efisien serta komunikasi dan kerjasama inter dan antar lembaga terkait yang semakin meningkat.
- d. Kesadaran dosen dan mahasiswa yang berjiwa penuh pengabdian serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa.
- e. Kualitas serta kuantitas program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tepat guna dan berhasil guna serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta masyarakat belajar yang semakin berkurang sifat ketergantungannya.
- f. Sumber daya manusia/masyarakat yang berkualitas serta terbinanya masyarakat belajar.

B. Tujuan Khusus Program Pengembangan

Pusat Pengabdian Pada Masyarakat pada akhir pelaksanaan program pengembangan Lima Tahun Paruhan I hendaknya dapat mewujudkan:

1. Seluruh dosen IKIP Padang memiliki persepsi yang sama dan tepat mengenai hakekat, pengertian secara operasional, azas-azas, ciri, karakteristik, strategi, tema, bentuk, jenis, dan sifat program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dari persepsi

yang sama mengenai aspek-aspek tersebut di atas akan dapat diwujudkan:

- a. Program pengabdian yang relevans yang dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Program kegiatan yang berkesinambungan, sehingga dapat menjawab permasalahan masyarakat secara tuntas dan tepat guna.
 - c. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kelima bentuk program kegiatan.
 - d. Program kegiatan perintisan.
 - e. Penghayatan dan pengamalan azas metodologi ilmiah oleh dosen pengabdian, sehingga tercermin dalam tahap-tahap yang sistematis sesuai pendekatan ilmiah yang dilalui oleh dosen, pengabdi dalam melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Kerjasama intern dan ekstern, sehingga dapat diperoleh relevansi dan jawaban permasalahan masyarakat secara memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Disektor sistem evaluasi keberhasilan pelaksanaan mutu program baik yang bersifat proses pengembangan maupun program kegiatan diharapkan dapat dihasilkan.
- a. Sistem dan instrumen evaluasi program pengembangan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Sistem dan instrumen evaluasi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP. PADANG

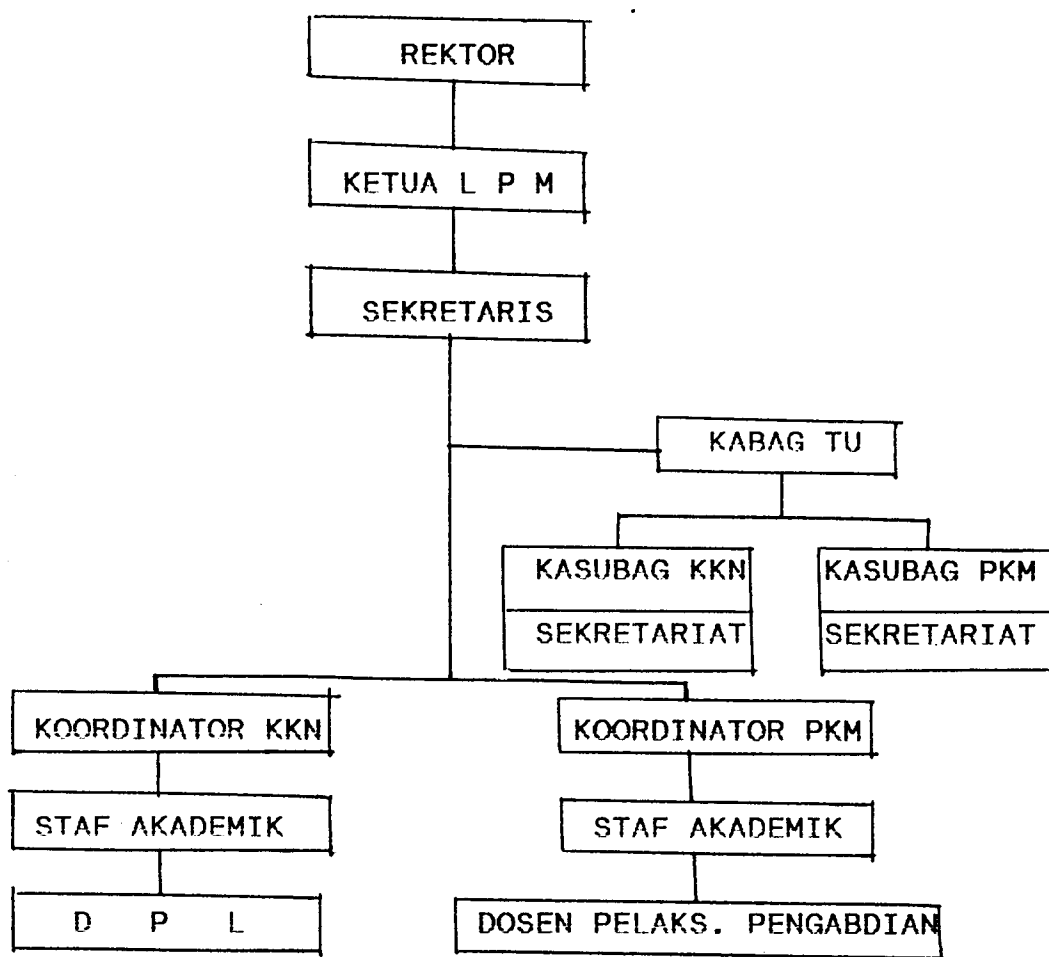
- c. Sistem dan instrumen pemberian angka kredit untuk dosen selaku pelaksana program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Sistem dan instrumen evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh mahasiswa.
 - e. Sistem informasi pedesaan yang mengungkapkan potensi sumber daya masyarakat, sumber daya alam, dan permasalahan masyarakat pedesaan.
3. Disektor tenaga pengelolaan administrasi dan staf akademik dapat ditambah jumlahnya yang berkualitas profesional sehingga Pusat Pengabdian Pada Masyarakat mampu mengelola programnya dengan baik.
 4. Di sektor sarana dan prasarana, Pusat Pengabdian Pada Masyarakat memiliki ruangan kerja, kelengkapan administrasi dan instrumentasi penunjang kegiatan serta kendaraan roda empat yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat.
 5. Di sektor dana dan sumbernya diharapkan dapat mengupayakan penambahan jumlah dan sumbernya sehingga dapat mendukung pelaksanaan program pengembangan pengabdian kepada masyarakat.
 6. Di sektor mekanisme kerjasama dapat dihasilkan suatu pola kerja yang efisien, efektif, cepat dan dinamis.

Pada akhir tahun ke lima pelaksanaan program operasional pengembangan program pengabdian kepada masyarakat Tahap Lima Tahun Paruhan Ke II diharapkan dapat diwujudkan:

1. Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat yang berstatus Lembaga dengan nama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris dengan struktur organisasi seperti bagan di bawah ini:

Bagan 1.

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IKIP PADANG



Berdasarkan :

- UU RI No. 2 tahun 1990
- PP No. 30 Tahun 1990
- STATUTA IKIP PADANG TAHUN 1992

2. Melengkapi personalia kelembagaan sesuai dengan struktur organisasi yang sudah dikembangkan seperti tersebut di atas dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku dan persyaratan profesional dan berjiwa penuh pengabdian tanpa pamrih (memiliki dedikasi yang tinggi).

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN

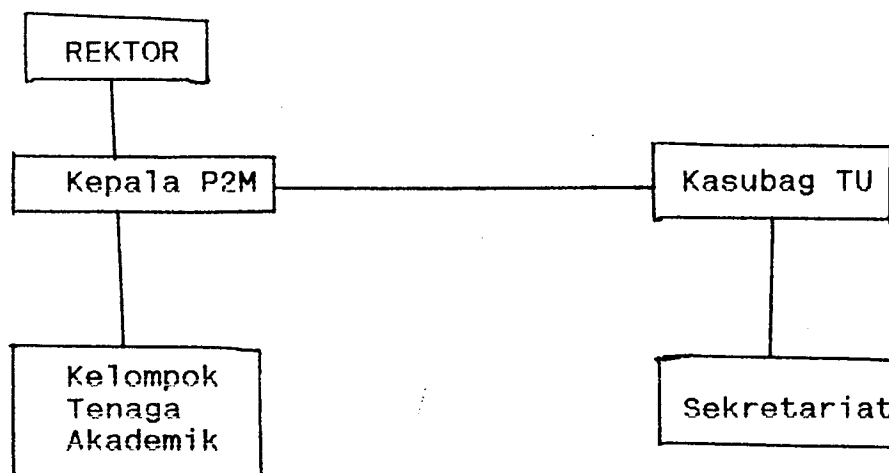
Arah dan orientasi pengembangan pengabdian kepada masyarakat seperti tersebut di atas menghendaki pendekatan atau strategi tertentu/ terarah pula, yaitu:

"Setiap langkah perlu berorientasi kepada kebutuhan dan masalah yang timbul dalam masyarakat, dan memperhatikan sosio kultural masyarakat serta potensi IKIP Padang".

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980 Pasal 38, status kelembagaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Padang adalah setingkat Pusat dengan nama Pusat Pengabdian Pada Masyarakat. Adapun struktur organisasi kelembagaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Padang sebagai yang terlihat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IKIP PADANG



Bagan Struktur Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat di atas sesuai dengan:

- PP. No. 5 tahun 1980
- Kepres No. 40 tahun 1982,
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 0126/0/1983

Dari struktur yang tertera di atas, maka kelengkapan personilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4

Kadaan Personalia Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	PANGKAT/GOLONGAN		
			IV	III	II
			d:c:b:a	d:c:b:a	d:c:b:a
1	Kepala Pusat	1	: :X:	: : :	: : :
2	Kasubag TU	1	: : :	: :X:	: : :
3	Staf TU	1	: : :	: :X:	: : :
	(5 orang)	2	: : :	: : :	:X: :
		1	: : :	: : :	: :X:
4	Kelompok Te-	2	: :X:	: : :	: : :
	naga Akademik	1	: : :X	: : :	: : :
	(5 orang)	2	: : :	X: : :	: : :

Seiring dengan harapan pembangunan nasional, daerah dan harapan pendidikan terhadap pengabdian kepada masyarakat maka strategi pengembangan juga diusahakan sesuai dengan harapan tersebut.

WALIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

A. Harapan Nasional

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Tujuan pembangunan nasional tersebut akan dapat dicapai secara bertahap yakni melalui Pelita demi Pelita. Setiap Pelita mempedomani GBHN yang disusun oleh rakyat melalui wakil-wakilnya didalam Sidang Umum MPR dalam setiap penghujung pelaksanaan Pelita sebelumnya. Semua perubahan disektor-sektor kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dipandu oleh GBHN tersebut; dan seluruh rangkaian perubahan dan prosesnya itu dicapai berlandaskan kepada beberapa azas, diantaranya Azas Manfaat dan Azas Usaha Bersama. Dengan berdasarkan azas-azas yang dimaksud maka akan diwujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat dan pribadi warga negara yang mampu mengembangkan dirinya sendiri, dan untuk pencapaian perubahan yang demikian harus diusahakan oleh seluruh rakyat secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Masyarakat kampus perguruan tinggi selaku bagian integral rakyat Indonesia dengan sendirinya tidak lepas dari keharusan ikut serta dalam gerakan pembangunan



tersebut. Demikian juga halnya dengan IKIP Padang.

B. Harapan Daerah

Tujuan Pembangunan Nasional dijabarkan menjadi pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Mencapai tujuan yang demikian itu memerlukan usaha peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat serta peranan pemerintah daerah.

IKIP Padang sebagai bagian integral masyarakat Provinsi Sumatera Barat terdorong untuk memprakarsai dan melibatkan diri secara konsisten dalam usaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan yang diisyaratkan oleh tuntutan atau harapan pembangunan daerah seperti dijelaskan di atas. Prakarsa dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan tersebut oleh IKIP Padang penyelenggaraannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Kelembagaan pengabdian pada masyarakat.

C. Khusus Bidang Pendidikan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rakernasnya dalam tahun 1990 telah menyepakati dan menetapkan kebijaksanaan Umum Pembangunan Umum Pendidikan yaitu mewujudkan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Secara khusus tujuan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi menurut PP No. 30 tahun 1990 diantaranya usaha mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan memperkaya kebudayaan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sehubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat itu adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. (PP No. 30 tahun 1990, BAB III, Pasal 3, ayat (4). Penyelenggaraannya melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok, dan perorangan. Selanjutnya ditegaskan bahwa Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana dilingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan (PP. No. 30 BAB VIII Pasal 43 ayat (1), dan (2). IKIP Padang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri mempunyai tujuan pendidikan seperti tertuang dalam PP No. 30 tahun 1990 yang khusus berperan dalam pengadaan tenaga kependidikan.



Karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh IKIP Padang dicirikan pula dengan unsur kependidikan tersebut. Penyelenggaraannya dipercayakan kepada Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat IKIP Padang.

Perlu digarisbawahi bahwa khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan PP No. 5 tahun 1980, semenjak telah diterbitkan Kepres No. 40 tahun 1982 sudah memiliki wadah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai status mulai dari lembaga, pusat sampai kepada tingkat balai sesuai dengan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Dengan diterbitkannya PP No. 30 tahun 1990 terbuka peluang kepada masing-masing universitas/institut negeri untuk membenahi organisasi pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keperluan. Mengingat syarat keperluan maka jelas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang giat membangun tetapi kekurangan tenaga terdidik, perguruan tinggi memerlukan adanya sebuah wadah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semakin diserasikan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh tuntutan yang menghendaki perguruan tinggi ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan persyaratan kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan status dan struktur organisasi kelembagaan pengabdian kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimilikinya baik

tenaga pengelola maupun sumber dan jumlah dana yang mampu disediakannya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan dapat disimpulkan beberapa rumusan yang terkait dengan strategi pengembangan kelembagaan pengabdian kepada masyarakat seperti tabel 5 dan tabel 6 di bawah ini.

Tabel 5

Beberapa Rumusan Tentang Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat Khas IKIP Padang

CIRI	KARAKTERISTIK	T H E M A
<p>Pengabdian kepada masyarakat oleh IKIP Padang harus mencerminkan adanya pendekatan kependidikan dalam realisasi ilmu amaliah dan anal ilmiah (adanya warna khas IKIP Padang sebagai satu LPTK, yaitu; keilmuan, keilmiah dan kependidikan).</p>	<p>Isi program kegiatan harus memberi peluang untuk digunakan pendekatan kependidikan yang diwarnai oleh keilmiah dan interdisipliner</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui intensifikasi pendidikan kerohanian terutama kalangan generasi muda dan rangka memperluas masyarakat edukatif religius; 2. Pengembangan sumberdaya manusia (muda) melalui pendidikan yang relevan dengan mutu kehidupan dan pendidikan; 3. Pembelajaran masyarakat khususnya lapisan masyarakat dalam kondisi "miskin" (Lack of Education, Low of Income); 4. Pendidikan kebiasaan hidup sehat dan tertib serta aman bagi masyarakat kota dan desa; 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan daerah; 6. Pembinaan dan pengembangan kreativitas, bakat dan kegemaran masyarakat; 7. Pengenalan dan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan; 8. Relevansi dan produktivitas layanan lembaga pendidikan; 9. Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup; 10. Peningkatan ketahanan diri, keluarga dan masyarakat dalam konteks ketahanan nasional; 11. Peningkatan dan pemeliharaan budaya daerah dan budaya nasional; 12. Pelayanan pendidikan bagi kelompok

Tabel 6

Beberapa Aspek Tentang Program dan Strategi Pengembangan
Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat
IKIP Padang

BENTUK	JENIS	SIFAT	SASARAN	TUJUAN	STRATEGI
1. Pendidikan kepada masyarakat	1. Penataran 2. Lokakarya 3. Kursus 4. Penyuluhan 5. Kampanye 6. Publikasi 7. Proyek Percontohan 8. Demonstrasi 9. Konsultasi -Hukum -Psikologi -Teknik -Seni Pendidikan 10. Bantuan darurat/ kemanusiaan 11. Kaji tindak (Action Research) 12. Pengembangan hasil-hasil penelitian 13. Kerjasama dengan pemerintah Daerah dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan pendidikan 14. Kuliah Kerja Nyata (KKN).	1. Perintisan 2. Penunjang Suplemen-ter 3. Penunjang Komplemen-ter	Masyarakat di luar kampus perguruan tinggi yang tidak terjangkau lagi dan tidak terca- kup lagi oleh program pen- didikan for- mal. Sasaran ini bisa perorang an, kelompok, organisasi pe merintah atau swasta atau komunitas dan masyarakat se cara keseluru han. Agar kegiatan efektif dan efisien pelak sanaannya ma- ka yang menja di sasaran utama adalah individu atau kelompok yang karena fungsi peran, atau kedudukannya menyerap, me- lipatgandakan menyebarluas- kan, dan atau meneruskan ha sil-hasil pe	UMUM 1. Jembatan penghubung dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masya- rakat yang membutuhkan- nya 2. Penerapan ilmu, tekno- logi dan se- ni berlan- daskan meto- logi ilmiah guna keper- luan kesinam- bunan pemba- ngunan. 3. Partisipasi dalam menye- laraskan, mem- perbaiki dan mengembang- kan mutu ke- hidupan se- suai dengan tujuan pem- bangunan na- sional KHUSUS/INSTITU- SIONAL 1. Pengembangan sumberdaya manusia ke arah tercipta- nya manu- sia pemba- ngunan.	Strategi pengembang- an yang par- tisipatif dalam pro- ses kegiat- an sejak tahap peren- canaan, pe- laksanaan & evaluasi dengan mak- sud untuk

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

BENTUK	JENIS	SIFAT	SASARAN	TUJUAN	STRATEGI
			<p>ngabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi (IKIP Padang)</p> <p>Disamping itu biasanya diutamakan pula individu atau kelompok yang masih dalam keterbelakangan, kemiskinan tetapi masih punya peluang untuk dikembangkan dalam batas kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan (IKIP Padang).</p>	<p>2. Pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat belajar</p> <p>3. Peningkatan kepekaan sosial para tenaga akademik dan mahasiswa terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.</p> <p>4. Pengembangan sistem pendidikan tinggi (misalnya menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.</p>	menjamin kesinambungan program kegiatan.

BAB V

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN

A. Program Pengembangan

Pengabdian kepada masyarakat telah memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan nasional. Itulah sebabnya mengapa eksistensinya diakui secara resmi. Pengakuan itu tertuang dalam klausul penjelasan UUD RI Nomor 2, tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional. Secara khusus dan lebih rinci tentang pengabdian kepada masyarakat diungkapkan dalam PP RI Nomor 30 tahun 1990. Ke dua produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah ini melandasi program pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Bertitik tolak kepada dasar pengembangan itu dan dengan mempedomani RIP IKIP Padang tahun 1980-1990, Memo Program Koordinatif Dikjen Dikti tahun 1990 serta statuta IKIP Padang Tahun 1992 ditetapkan kebijaksanaan umum pengembangan pengabdian kepada masyarakat seperti berikut:

1. Kebijaksanaan Umum Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - a. Mewujudkan manusia/masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - b. Melaksanakan usaha penyesuaian dan pembenahan penyelenggara pengabdian kepada masyarakat bertitik

- tolak pada PP Nomor 30 Tahun 1990 dan Statuta IKIP Padang Tahun 1992 secara bertahap dan berangsur dengan mempertimbangkan kondisi IKIP Padang.
- c. Meningkatkan kegiatan penelitian, pengkajian, penguasaan, pemanfaatan ilmu dan teknologi sesuai dengan masyarakat masa kini dan masa depan.
 - d. Melakukan pembinaan mahasiswa melalui KKN dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada tanah air dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mahasiswa peka terhadap lingkungannya, bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan terciptanya pribadi yang mandiri.
 - e. Menyempurnakan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan Kuliah Kerja Nyata oleh mahasiswa sebagai bagian sistem informasi pendidikan IKIP Padang.

Berdasarkan kebijaksanaan umum pengembangan di atas ditetapkan fokus atau arah dan orientasi pengembangan pengabdian kepada masyarakat, seperti penjelasan berikut:

2. Arah dan Orientasi Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- a. Pengabdian kepada masyarakat sebagai pranata dalam sistem pendidikan tinggi, sasarannya adalah pembangunan nasional yang bertujuan dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan pembangunan. Untuk itu perlu:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan staf pengajar/mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Pengembangan hubungan inter dan antar lembaga yang terkait.
 - 3) Pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat.
 - 4) Pemilihan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai keterkaitan atau relevansi yang erat dengan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
 - 5) Pengembangan struktur organisasi pengelola, meningkatkan personalianya secara kuantitas dan kualitas (dalam hal dedikasi dan profesionalisasi).
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi kepada kualitas sumber daya manusia/masyarakat dan terutama yang ada dalam kondisi yang kurang menguntungkan serta mengikuti perkembangan informasi iptek dan selalu peka terhadap kualitas lingkungan.
3. Program Operasional Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan kebijaksanaan, arah dan orientasi strategi pengembangan di atas serta berpedoman pada permasalahan lima tahun sebelum dan dewasa ini serta

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP BAPANG

kondisi dan prediksi situasi masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat IKIP Padang dewasa ini dan mendatang, maka program operasional pengabdian kepada masyarakat untuk sepuluh tahun mendatang (1990-200) meliputi:

- a. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pengabdian kepada masyarakat dalam pengelolaan program-program umum kelembagaan seperti tersebut pada bagian A1.
- b. Peningkatan pemahaman dan pengamalan hakekat, pengertian secara operasional, azas-azas, ciri, karakteristik, strategi, tema, bentuk, jenis dan sifat program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Peningkatan potensi kelembagaan yang meliputi tenaga kelembagaan dan staf pengajar pelaku kegiatan atau pengabdi, pengadaan ketentuan-ketentuan pengelolaan yang serasi, jumlah dan sumber dana, sarana dan prasarana penunjang, kualitas dan kuantitas program kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pengadaan instrumen evaluasi program pengembangan dan program pengabdian kepada masyarakat, serta tata cara pemberian angka kredit bagi pelaku kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai mahasiswa KKN.
- d. Penyempurnaan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat oleh staf pengajar dan KKN oleh

mahasiswa sehingga merupakan suatu kesatuan sistem informasi pendidikan IKIP Padang.

- e. Pengembangan struktur organisasi pengelola dan mekanisme kerjanya.
- f. Peningkatan hubungan inter dan antar lembaga terkait, dalam hal ini terutama dengan Pusat Penelitian IKIP Padang dan Pemda Tk. I serta Dinas/ Jawatan Tk.I dan swasta yang ada di Ibukota Provinsi.

Seluruh program operasional pengembangan pengabdian kepada masyarakat di atas disusun prioritasnya menurut tahapan lima tahunan pelaksanaan, seperti terlihat pada bagan/tabel di bawah ini:

Tabel 7

Perioritas Program Operasional Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Mendatang

TAHAPAN	PROGRAM OPERASIONAL PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahap Paruhan I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi kelembagaan 2. Peningkatan pemahaman aspek pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh dosen dan mahasiswa KKN 3. Peningkatan potensi kelembagaan 4. Penyempurnaan sistem informasi 5. Peningkatan hubungan inter dan antar lembaga terkait
Tahap Paruhan II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan program operasional pengembangan yang tercakup dalam tahap paruhan I 2. Pengembangan struktur organisasi 3. Peningkatan kualitas personalia organisasi kelembagaan 4. Pemilihan mekanisme kerja organisasi kelembagaan yang sederhana, efisien, efektif, cepat dan dinamis

B. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam program pengembangan mencakup:

1. Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Pengabdian Pada Masyarakat sebagai unsur pelaksana IKIP Padang di bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan PP. No. 5 tahun 1980 perlu disesuaikan status kelembagaannya dengan PP RI No. 30 tahun 1990 dan Statuta IKIP Padang Tahun 1992 yang sesuai dengan kebutuhan:

a. Tugas pokok Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Seperti telah dijelaskan dalam Statuta IKIP Padang Tahun 1992 Pasal 28 yakni: pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, yang bertugas:

- 1) Menjabarkan kebijaksanaan institut dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat antar fakultas;
- 3) Melaksanakan kontrak kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak luar institut yang bersifat antar fakultas;
- 4) Mengkoordinasi peningkatan kemampuan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Memantau dan mengevaluasi usul dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

6) Kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian untuk ikut berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang kependidikan.

b. Fungsi Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 39 PP. No. 5 tahun 1980 Pusat Pengabdian Pada Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1). Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2). Meningkatkan relevansi program IKIP Padang dengan kebutuhan masyarakat
- 3). Membantu masyarakat dalam pembangunan
- 4). Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah dan konsepsi pembangunan yang sesuai dengan pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antara IKIP Padang dengan badan lainnya di dalam dan di luar negeri (Pasal 40, PP. No. 5 tahun 1980).

2. Kegiatan Pokok Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat bersama dengan fakultas dan jurusan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, dan jurusan serta unit lainnya;

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP. PADANG

- c. Membina dan mengembangkan staf akademik agar mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bekerjasama fakultas dan jurusan;
- d. Memberikan informasi tentang program pengabdian kepada masyarakat kepada pihak di dalam maupun luar IKIP Padang.
- e. Mengelola hasil-hasil penelitian supaya dapat diterapkan serta dimanfaatkan umpan baliknya untuk meningkatkan pelaksanaan misi IKIP Padang;
- f. Mengelola, membina, dan mengembangkan:
 - 1) Program pendidikan berkelanjutan yang bersifat non formal
 - 2) Program yang bersifat pelayanan dan bantuan kepada masyarakat
 - 3) Program Pengembangan Wilayah Terpadu
 - 4) Program Kaji Tindak
 - 5) Program Desa Binaan
 - 6) Program yang bersifat darurat atau mendadak
- g. Mengidentifikasi masalah-masalah masyarakat untuk diteruskan kepada pihak tertentu di dalam IKIP Padang sebagai bahan umpan balik bagi penelitian dan pendidikan.
- h. Merintis, melaksanakan, membina dan mengembangkan kerjasama antar Universitas/Institut dan atau dengan Instansi-instansi lain dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat;
- i. Melakukan evaluasi terhadap semua usulan program

dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Padang;

- j. Mengusahakan sumberdaya dan dana di samping dana dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk lebih mensukseskan program pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

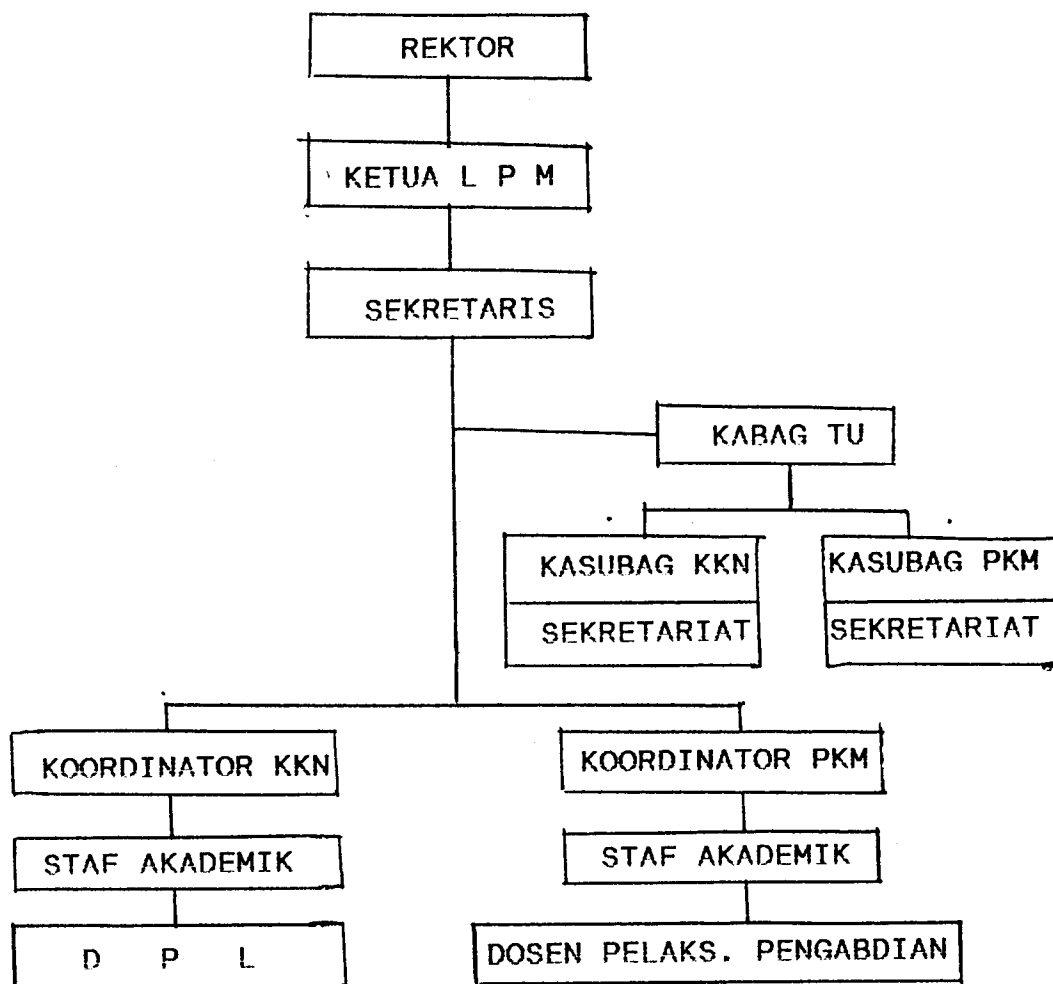
ORGANISASI DAN SUMBER DANA

A. Organisasi

Pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk ikut berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang kependidikan.

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris. Untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, maka dilengkapi dengan struktur sebagai berikut:

Bagan 3

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IKIP PADANG

Berdasarkan :

- UU RI No. 2 tahun 1990
- PP No. 30 Tahun 1990
- STATUTA IKIP PADANG TAHUN 1992

B. Pengelola

Sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat di IKIP Padang adalah program pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinatornya bertanggung jawab langsung kepada ketua lembaga.

Agar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara teknis dapat berjalan dengan lancar, perlu disusun suatu struktur organisasi yang menangani khusus tentang program pengabdian kepada masyarakat dengan fungsi ketatausahaan, administrasi dan keuangan, pematapan, evaluasi dan pengembangan serta kegiatan lapangan. Untuk jelasnya struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan 3 di atas.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas utama lembaga ini antara lain mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pengabdian kepada masyarakat. Fungsi program pengabdian kepada masyarakat IKIP Padang adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengabdian kepada masyarakat.
2. Merintis, melaksanakan, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan instansi di luar IKIP Padang dalam rangka program pengabdian pada masyarakat.
3. Mengurus, membina, mengembangkan program-program yang bersifat pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengurus, membina, mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat yang bersifat darurat dan mendadak seperti adanya bencana alam dan lain-lain.
5. Mengusahan dana dari sumber-sumber lain selain dari IKIP Padang ataupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Membina, mengurus, mengembangkan program-program pendidikan, sambung-menyambung bagi masyarakat.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

seperti pendidikan formal.

7. Menyelenggarakan, merangsang dan mengusahakan pertemuan-pertemuan antara disiplin ilmu untuk menelaah masalah-masalah yang akan dilaksanakan.
8. Menyelenggarakan/ memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat dan lingkungan sendiri tentang program-program pengabdian kepada masyarakat yang ada.
9. Mengkoordinasikan program-program pengabdian kepada masyarakat yang perlu dilkauan antar perguruan tinggi.

D. Sumber Dana

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semakin berkembang, meningkat dan meluas maka diupayakan sumber dana sebagai berikut:

1. SPP/DPP IKIP Padang setiap tahun anggaran (Dana SPP/DPP IKIP Padang yang diterima untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan sebesar 7,0% dana SPP/DPP IKIP Padang untuk setiap tahun anggaran).
2. Dana rutin.
3. OPF IKIP Padang setiap tahun anggaran .
4. Bantuan Pemda Tk.I Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam bentuk kerjasama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akbar, Steady, R.Purnomo (1986); Kedudukan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pendidikan Khusus Pemanfaatan KKN Dalam Pengembangan Pendidikan, Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Karhiwikarta Wahyu (1990); Pengabdian Pada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi, LPM Universitas Padjadjaran, Bandung.
- L. Gibson, James (1992); Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Proses, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Woworuntu, Tony (1991); Manajemen Untuk Sekretaris, Penebit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , (1990); Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Padang 1990-2000, IKIP, Padang.
- , (1992); Statuta IKIP Padang, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.
- , (1989); Repelita Buku IV, Tentang Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia Percetakan Negara RI, Jakarta.
- , (1989); Rencana Pengembangan Lima Tahun 1989/1990 - 1993/1994 Buku II, Republik Indonesia Percetakan Negara RI, Jakarta.
- , (1978); Kerangka Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Indonesia, Ditbinlitabmas, Jakarta.
- , (1992); Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi, Ditbinlitabmas, Jakarta.
- , (1989); Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengabdian pada Masyarakat IKIP Padang Tahun 1990, P3M, Padang.
- , (1988); Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Republik Indonesia Percetakan Negara RI, Jakarta.